

TESIS

**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN
ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-
CICURUG**

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

***CONSPIRACY PRACTICES IN THE PROCUREMENT OF WORK
FOR THE CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC SIGNALING
SYSTEM FOR THE DOUBLE TRACK RAILWAY BETWEEN
BOGOR AND CICURUG***

(Decision Number 18/KPPU-L/2022)



Oleh:

WARDI

NIM. 2210622088

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN
ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-
CICURUG**

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

***CONSPIRACY PRACTICES IN THE PROCUREMENT OF WORK
FOR THE CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC SIGNALING
SYSTEM FOR THE DOUBLE TRACK RAILWAY BETWEEN
BOGOR AND CICURUG***

(Decision Number 18/KPPU-L/2022)



Oleh:

WARDI

NIM. 2210622088

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN
ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-
CICURUG**

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

WARDI

NIM. 2210622088

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN
ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-
CICURUG**

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

Disusun dan diajukan oleh:

WARDI

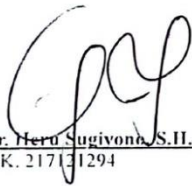
NIM.2210622088

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal, 19 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Heru Sugivono, S.H., M.H.
NIK. 217131294

Pembimbing 2



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

iii

TESIS

PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA
KERETA API LINTAS BOGOR-CURUG
(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

Disusun dan diajukan oleh:
WARDI
NIM. 2210622088

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 26 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Heru Sugiono, S.H., M.H.
NIK. 217121294

Pembimbing 2



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wardi
NIM : 2210622088
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul "PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-CICURUG (Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2024

Membuat Pernyataan,



Wardi

NIM.2210622088

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardi
NIM : 2210622088
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-CURUG (Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)**" beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2024

ng Membuat Pernyataan,



Wardi
NIM. 2210622088

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbal ‘aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
2. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
3. Dr. Suherman S.H., LL.M selaku dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
4. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. dan Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
6. Istri tercinta yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungannya.

7. Para Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, kritik yang membangun sehingga penulis dapat memaksimalkan dalam penyusunan tesis ini.
8. Para kerabat serta teman-teman Magister Hukum 2022 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan di Magister Hukum.

Jakarta, Juni 2024
Penulis

Wardi

ABSTRACT

CONSPIRACY PRACTICES IN THE PROCUREMENT OF WORK FOR THE CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC SIGNALING SYSTEM FOR THE DOUBLE TRACK RAILWAY BETWEEN BOGOR AND CICURUG.

(Decision Number 18/KPPU-L/2022)

Wardi

Using normative legal research with a statutory approach and a case approach, this research is prescriptive and analyzed using descriptive qualitative methods after collecting data through the literature. That Indonesia has entered the world of digital technology, including in terms of procurement of government goods and services. To reduce indications of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in government, the procurement process for goods and services is carried out through electronic media. Ethics in the procurement of goods and services is good behavior from all parties involved in the procurement process. The principles that need to be applied in the procurement of goods and services include efficiency, effectiveness, transparency, openness, competition, fairness/non-discrimination, and accountability. To fulfill this principle, a maximum supervision system is needed, so that there is a need for an electronic-based audit system to make it easier for inspection officials to carry out inspections in real time. There are indications of bid rigging in the electronic procurement of government goods and services, so the government's role as a form of responsibility is needed, so the existence of the Business Competition Supervisory Commission is also one of the institutions authorized to maintain the stability of the procurement of goods and services in Indonesia. Dispute resolution through the Business Competition Supervisory Commission is carried out by parties suspected of having committed fraud in the procurement of goods and services through tenders and electronic media. The indications include similar IP addresses, similar metadata, similar offers, similar access locations and so on. The form of sanction given by the KPPU is a fine that will be imposed on the Reported Parties who are proven guilty of conspiring in the procurement of these goods and services.

Keyword: *goods/services, procurement, conspiracy.*

ABSTRAK

PRAKTIK PERSENGKONGKOLAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR-CICURUG

(Putusan Nomor 18/KPPU-L/2022)

Wardi

Menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bersifat preskriptif serta di analisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif setelah dilakukan pengumpulan data melalui kepustakaan. Bahwa Indonesia telah memasuki dunia teknologi digital, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka mengurangi indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan maka proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui media elektronik. Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Prinsip yang perlu diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel. Untuk memenuhi prinsip tersebut maka diperlukan sistem pengawasan yang maksimal, sehingga kemudian perlu adanya sistem audit yang juga berbasis elektronik untuk memudahkan aparat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara real time. Adanya indikasi persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, maka diperlukan peran pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, maka adanya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjadi salah satu lembaga yang berwenang dalam menjaga stabilitas pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan oleh para pihak yang diduga telah melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa melalui sarana tender dan media elektronik. Adapun indikasinya diantaranya adanya kesamaan IP Address, kesamaan metadata, kesamaan penawaran, kemiripan lokasi akses dan lain sebagainya. Bentuk sanksi yang diberikan oleh KPPU adalah denda yang akan dibebankan kepada para Terlapor yang terbukti bersalah melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Kata Kunci: barang/jasa, pengadaan, persekongkolan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Berpikir	69
C. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sumber Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...Error! Bookmark not defined.	
A. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Indonesia	Error! Bookmark not defined.

B. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Terjadinya Praktek Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP ..	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan ..	Error! Bookmark not defined.
B. Saran ..	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSATAKA ..	Error! Bookmark not defined.